

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SAKSI  
TINDAK PIDANA ZINA DALAM  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**NURULINA ROSDIAWATI**

**NPM : 1121020038**

**Jurusan : Jinayah Siyasah**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
2018**

## ABSTRAK

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan ketentuan tentang saksi dalam hukum Islam dan hukum positif. Rumusan masalah penelitian ini adalah persamaan atau perbedaan dalam ketentuan tentang saksi tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum positif serta mengapa terjadi perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian pustaka yaitu penelitian yang menggunakan media perpustakaan untuk mendapatkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang tersedia.

Tujuan penelitian ini dalam lingkungan masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang melanggar norma-norma agama yang diterapkan dan dilarang dalam Agama Islam seperti perbuatan zina, dengan adanya penelitian ini diharapkan segala kalangan dapat memahami hukum dan sanksi untuk perbuatan tersebut, sehingga mereka merasa takut untuk melakukan perbuatan itu. Sedangkan dalam dunia akademis maupun aturan hukum agar lebih memperhatikan secara spesifik ketentuan, hukuman, kesaksian dan penerapannya supaya kelak terdapat pembaharuan hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan aturan adat, norma serta agama berlaku.

Hasil analisa dari penelitian ini bahwa kedudukan saksi dalam al-qur'an adalah sebagai rukun dan mesti berjumlah dua orang laki-laki, sedangkan kedudukan saksi dalam hukum acara perdata hanya sebagai salah satu bukti. Perbedaan lain yang terdapat di antara kedua sistem tersebut yaitu saksi dalam al-qur'an untuk menyaksikan akad atau transaksi yang berlangsung sementara saksi dalam hukum acara perdata untuk menyampaikan kesaksian, begitu pula dalam hukum positif saksi digunakan untuk menyampaikan kesaksian.

Implikasi yang dapat terjadi dari perbedaan kedua sistem tersebut adalah sulitnya proses peradilan untuk dilaksanakan karena ketentuan saksi yang mengharuskan berjumlah 4 orang apabila saksi tersebut perempuan karena, kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Jika jumlah saksi kurang dari 4 orang untuk kesaksian seorang perempuan maka kesaksiannya tidak dapat diterima dan proses peradilan tidak dapat dilakukan.

Kesimpulan dari penelitian ini adanya perbedaan ketentuan saksi dalam hukum Islam dan hukum positif apabila terdapat saksi perempuan maka harus 2 orang perempuan agar dapat dikatakan 1 saksi, karena nilai kesaksian perempuan menduduki dari nilai kesaksian laki-laki. Sedangkan dalam hukum positif seorang saksi perempuan sudah cukup untuk dikatakan sebagai saksi dan kesaksiannya dapat di persaksikan dalam pengadilan. Persamaan dalam kedua sistem hukum ini adalah saksi digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, karena pembuktian merupakan proses pengungkapan suatu peristiwa yang telah lalu guna mendapatkan gambaran suatu peristiwa yang sebenarnya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421*

**PERSETUJUAN**

Nama : NURULINA ROSDIAWATI  
NPM/JUR : 1121020038/ Siyasah  
Pembimbing I : Dr. SitiMahmudah, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Drs. Hendry Irwansyah, M.A  
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP KETENTUAN  
SAKSI TINDAK PIDANA ZINA DALAM  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 14 Oktober 2017

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.196210221993031002**

**Drs. Hendry Irwansyah, M.A**  
**NIP. 198003152009011017**

**Ketua Jurusan Siyasah**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I**  
**NIP. 195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703531,780421*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SAKSI TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**, disusun oleh **NURULINA ROSDIAWATI** NPM 1121020038. Program Studi **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal: Rabu / 14 Februari 2018.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.** (.....)

**Penguji I : Drs. H. Said Jamhari, M.Kom.I** (.....)

**Penguji II : Drs. Hendry Irwansyah, M.A** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



**Drs. Hendry Irwansyah, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 1969011997031002

## MOTTO

﴿الْكَاذِبُونَ هُمُ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَلْزِمُونَ الْكَافِرِينَ ۖ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَكَرِهُوا الْحَقَّ ۖ فَهُمْ كَاذِبُونَ ۚ﴾



*“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.” (Q.S. An-Nuur : 13)*

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَلْزِمُونَ الْكَافِرِينَ ۖ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَكَرِهُوا الْحَقَّ ۖ فَهُمْ كَاذِبُونَ ۚ﴾

﴿الْفَاسِقُونَ هُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَكَرِهُوا الْحَقَّ ۖ فَهُمْ كَاذِبُونَ ۚ﴾

*“ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S. An-Nuur : 04)*

## **PERSEMBAHAN**

*Assalammu'alaikum Wr. wb*

Salam silaturahmi penulis sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa Rasimin, S.Ag Mama ku tercinta Mardiyah, S.Pd.SD yang tak pernah bosan mendo'akan kebaikan disetiap langkah anak-anaknya, terima kasih untuk begitu banyak cinta yang diberikan sedari aku kecil hingga sekarang.
2. Untuk kakak yang saya sayangi Adi Setiawan yang selalu memberikan motivasi dan do'a, semoga menjadi muslim yang soleh.
3. Untuk adikku yang saya cintai Rahmat Adhy Wicaksana yang selalu memberikan motivasi dan do'a, semoga skripsi ini terselesaikan dengan cepat.
4. Serta seluruh keluarga besar yang tak bisa saya sebutkan satu persatu dan terimakasih atas bimbingan serta do'a restunya.
5. Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya, baik dalam tindakan maupun perbuatan.
6. Serta para pembaca ilmu pengetahuan.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Nurulina Rosdiawati, dilahirkan di Gayau Sakti pada tanggal 03 Januari 1993, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Papa Rasimin, S.Ag dan Mama Mardiyah, S.Pd.SD

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis diawali dengan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 5 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah yang di selesaikan pada tahun 2005, setelah itu melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selesai pada tahun 2008, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Poncowati Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Bandar Lampung pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, Mei 2016

Yang mebat,

Nurulina Rosdiawati

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Berkat petunjuk dari Allah Jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah, jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dalam penyusunan skripsi ini penulis tak luput dari berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, demi penyempurnaan karya tulis ini.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hi. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M.Kom selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah.



4. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag dan Drs. Hendry Irwansyah, M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
  5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah serta seluruh sivitas akademika fakultas yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
  6. Karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
  7. Kedua orang tua penulis tercinta Papa Rasimin, S.Ag dan Mama Mardiyah, S.Pd.SD yang tiada henti meneteskan keringat serta memberi dukungan, saran dan do'a demi menanti keberhasilan penulis.
  8. Kakak penulis Adi Setiawan dan adik penulis: Rahmat Adhy Wicaksana, yang penulis sayangi yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
  9. Teman-teman seperjuangan, Merlia Anggraeni, S.H, Luciyana, S.H, Oktan Trias Putra, S.H.I, M.H yang menemani dan memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi.
  10. Almamater kebanggaan UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya, baik dalam tindakan maupun perbuatan.
- Akhirnya penulis berharap semoga amal baik yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari

bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, *aamiin*

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Mei 2017

Nurulina Rosdiawati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Saksidalam Hukum Islam.....	13
B. Ketentuan Saksidalam Hukum Islam .....	15
C. Dasar Hukum Kesaksian .....	18
D. Syarat Saksidalam Hukum Islam .....	21
E. Macam-macam Bentuk Persaksian .....	25
<b>BAB III SAKSI MENURUT HUKUM POSITIF</b>	
A. Saksidalam Hukum Positif .....	34
1. Asas-asas Hukum Saksi .....	35
2. Peranan Saksidalam Hukum .....	37
3. Macam-macam saksi .....	40
B. Perlindungan Saksidalam Hukum Positif.....	43
C. Hak dan Kewajiban Saksi .....	47
D. Kedudukan Saksi .....	50
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SAKSI TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Tentang Keharusan Adanya Saksi .....	50

B. TentangJumlahdanJenisKelaminSaksi .....	56
C. ImplikasiTerhadap Proses Peradilan .....	63

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SAKSI TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>1</sup>
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>2</sup>
3. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>2</sup>Kanter E.Y, Sianturi S.Y, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: PenerbitStoriaGrafika, 2002), h. 122.

<sup>3</sup>Soesilo.R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988). h. 209

4. Hukum Islam adalah hukum yang berpijak pada *kitabullah* dan *kitabulhadits* sebagai sumber utama dan ijtihad sebagai pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna sumber utama.<sup>4</sup>
5. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat atau suatu Negara, pada waktu tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud keseluruhan dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang kedudukan seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana zina sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan objektif**

Masalah saksi tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum positif mendapat perhatian yang berbeda dalam hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut tentang masalah perbedaan saksi yang signifikan dalam hukum Islam dan hukum positif. Terlebih dalam tindak pidana zina, syarat dan ketentuan saksi harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, dalam hukum Islam perbedaan jenis kelamin untuk saksi sangat diperhatikan, apabila terdapat saksi perempuan maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Sedangkan

---

<sup>4</sup>Amnawaty, WatiRahmiRia, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampug, 2008), h. 7

<sup>5</sup> Kanter E.Y, Sianturi S.Y, *Op Cit*, h. 6

dalam hukum positif perbedaan jenis kelamin tersebut tidak begitu menjadi perhatian bahkan seorang wanita di minta kesaksiannya dalam kasus-kasus pidana jika memang sangat dibutuhkan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1909 BW Jo Pasal 299 ayat 1 HIR.

## 2. Alasan subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari'ahan khususnya Jurusan Jinayah Siyasa.

## C. Latar Belakang Masalah

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Jadi di sini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kesaksian (*syahaadah*) itu di ambil dari kata *musyahaadah*. Yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan di lihatnya. Maknanya ialah

pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu).

Dikatakan pula bahwa kesaksian (syahaadah) berasal dari kata I'laam (pemberitahuan). Firman Allah Ta'aala QS. Ali Imran:18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

*“ Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia ”*

Di sini arti dari kata syahaada adalah ‘alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya. Sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.<sup>7</sup>

Ketentuan tentang saksi dalam hukum Islam dan hukum positif itu jelas sekali perbedaannya. Dalam hukum Islam untuk tindak pidana zina, ketentuan saksi itu harus berjumlah empat orang laki-laki muslim yang adil dan dapat dipercaya, apabila ada satu saksi perempuan maka perempuan tersebut harus dua orang sehingga dapat dikatakan saksi, dan memenuhi syarat menjadi saksi yaitu Islam, dewasa (baligh), berakal sehat, dapat dipercaya dan adil.

Sedangkan dalam hukum positif satu orang sudah dapat dikatakan sebagai saksi, laki-laki maupun perempuan tidak berpengaruh dalam jumlahnya dan memenuhi syarat menjadi saksi yaitu: mengucapkan sumpah, keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat dan ia alami sendiri, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Pemeriksaan menurut cara yang

---

<sup>6</sup> Q.S. Ali Imran (03) :18

<sup>7</sup> SabiqSayyid, *FikihSunnah 14* (Bandung : PT Al-Ma' Arif 1993), h. 55



ditetapkan undang-undang. Inilah perbedaan yang terlihat signifikan dalam ketentuan saksi yang dapat dijumpai baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Terkadang masyarakat sekitar salah mengartikan atau tidak memahami ketentuan-ketentuan tersebut sehingga mereka hanya mengikuti apa yang mereka ketahui tanpa mengetahui yang sebenarnya. Terlebih lagi ketentuan saksi untuk tindak pidana zina, dari pengertiannya saja tindak pidana zina itu sudah berbeda dengan hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam, menurut para ulama yang terdapat dalam mazhab Syafi'i yaitu :

ا يلا ج فر ج في فر ج محرم لذاته حال عن شبهة مشتهى طبعاً<sup>8</sup>

*“Memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesamaran dan secara alami perbuatan itu di senangi.”*

Perbuatan zina dalam hukum Islam dibedakan kepada dua bentuk yaitu muhsan (orang yang sudah menikah) dan ghairu muhsan (orang yang belum menikah), dengan hukuman bagi orang yang sudah menikah (muhsan) adalah dirajam sampai ia menemui ajalnya. Adapun dasar hukumnya hadist Nabi Muhammad SAW:

خذ و عني خذ و عني قد جعل الله لهن سبيلاً لبكر با لبكر جلد مائة و نفى سنة

و الثيب با لثيب جلد مائة و الرجم

---

<sup>8</sup> Syarifudin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Prenada Madia 2003), h. 276

*“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.”* (H.R. Muslim dari “Ubadah bin Samit: 3199).

sedangkan hukuman bagi mereka yang belum menikah (ghairu muhsan) adalah di dera 100 kali atau di asingkan selama satu tahun. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ <sup>ط</sup>...<sup>9</sup>

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat”* . . .

Hadist Nabi SAW

إذا زنت أمة أحدكم فليحد لها. رواه مسلم

*“Bila hamba sahayamu berzina, maka had-lah dia”.* (Riwayat Muslim).

Menurut Abu Hanifah bahwa seseorang yang diasingkan karena berzina (sesudah dicambuk) adalah dengan pertimbangan hakim (Imam) dan melihat kepada kepentingannya. Dan menurut Maliki bahwa yang diasingkan itu adalah bagi yang laki-laki dan tidak pada perempuan.<sup>10</sup>

Di dalam hukum positif perbuatan zina juga di larang dan diberikan ancaman hukuman bagi yang melakukannya. Dalam KUHP istilah yang digunakan untuk menunjuk pada perbuatan zina adalah permukahan. Mukah ialah dilakukan oleh seorang wanita yang mengadakan senggama dengan seorang pria

<sup>9</sup> Q.S. An- Nuur (24) : 2

<sup>10</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta, Rhineka Cipta: 2001), h.540

yang bukan suaminya dan oleh seorang pria yang mengadakan hubungan senggama dengan wanita yang diketahuinya sudah menikah, meski perkawinan itu dinyatakan batal.

Melihat dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan saksi dalam hukum Islam dan hukum positif itu sangat berbeda, bahkan pengertian tindak pidana zina itu sendiri berbeda jauh perbedaan ini tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, perbedaan penerapan hukum inilah yang menarik perhatian penulis sehingga penulis menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisi Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa titik permasalahan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif dalam mengatur tindak pidana zina sekaligus untuk mencoba menelaah mengapa perbedaan tersebut terjadi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah persamaan atau perbedaan dalam ketentuan tentang saksi tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum positif?
2. Mengapa terjadi perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang saksi dalam pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan masing-masing sistem hukum yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam mengatur tentang saksi tindak pidana zina.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan)
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai perbedaan saksi dan pengertian zina.
  - b. Dapat menjadi bahan informasi kajian akademis sekaligus sebagai bahan kajian ilmiah dalam penyelesaian tindak pidana zina
2. Kegunaan praktis (bagi masyarakat)
  - a. Sebagai penambah wawasan berpikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai saksi tindak pidana zina
  - b. Sebagai titik tolak dan pengkajian lebih lanjut secara mendalam bagi pihak yang berkepentingan serta menjadi acuan yang dapat dikembangkan selanjutnya.

#### **G. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat komperatif. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pendapat-pendapat para ahli yang terdapat dalam fiqih-fiqih Islam, hadits Al-Qur'an dan dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, dengan buku-buku hukum pidana untuk mencari kedudukan hukum Islam dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

#### b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, analisis, kualitatif, dan komperatif serta cara berpikir induktif (*induktif approach*). Karena dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan dengan memulai dari data yang sifatnya khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang sifatnya umum.

## 2. TeknikPengumpulan Data

Untuk mendapatkan data maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda,

---

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h . 28

dan sebagainya.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mempelajari ketentuan yang berlaku diperpustakaan.
- b. Membaca, mencatat, dan mengutip sesuai dengan yang dibutuhkan (sesuai dengan pembahasan).
- c. Membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lain demi lengkapnya data yang dibutuhkan.

### 3. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorisasikan data dengan carapemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.<sup>13</sup>
- c. Rekonstruksi data (*recontructioning*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

---

<sup>12</sup> SutrisnoHadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: FakultasPsikologi UGM, 1983), h. 202.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* ( Jakarta, Galhia Indonesia, 1990), h. 64

- d. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>14</sup>

Setelah mengumpulkan data, penulis mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari :

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Data primer dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan test.

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi,

---

<sup>14</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung,:PT.CitraAsitya Bhakti, 2004), h. 127.

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>15</sup> Menurut Miles, Huberman dan Yin, tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).<sup>16</sup>

Data yang diperoleh dianalisa secara bertahap dan berlapis dengan metode teori yang digunakan dalam penelitian ini secara analisis deskriptif, kualitatif dan komperatif. Analisis ini dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang dituangkan dalam sistematis pembahasan dan dijawab dalam kesimpulan penelitian ini. Untuk mengambil kesimpulan ini penulis menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan memulai dari data yang sifatnya khusus kepada data yang bersifat umum.

Dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

---

<sup>15</sup>Imam Suprayoga&Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2003), h. 191.

<sup>16</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*,h. 192.



## BAB II

### SAKSI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Saksi dalam Hukum Islam

Secara terminologi (*istilah*). Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya.”<sup>17</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

وهي اخبار صادق لا ثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

*“Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan”.*

Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam maupun hukum positif kedudukan saksi sangat penting dalam proses peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.

Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, adanya seorang saksi sangat menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atau tersangka yang telah melakukan tindak pidana, dan menjadi acuan hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

---

<sup>17</sup> [http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-maskin2101-867-BAB2\\_210-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-maskin2101-867-BAB2_210-2.pdf), di akses tanggal 22 juli 2016

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.231

<sup>19</sup> 1 Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 93.

Dalam kamus Istilah fiqh, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".<sup>20</sup>

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah (orang yang) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut mesti laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas konkret tetapi hanya dijadikan bacaan dan wacana saja. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis akan memaparkan penjelasan saksi yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagaimana dengan konteks dalam kitab-kitab fiqh di atas, salah satunya yaitu tindak pidana zina.

Dalam tindak pidana zina terdapat tiga macam pembuktian, yaitu : dengan saksi, dengan pengakuan, dan dengan qarinah. Yang akan penulis jelaskan dalam masalah ini yaitu pembuktian dengan saksi. Para ulama telah sepakat

---

<sup>20</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306.

bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi, apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti lainnya.

## B. Ketentuan Saksi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mesti di tetapkan untuk saksi-saksi dalam setiap jarimah, termasuk jarimah zina yang mesti diperhatikan. Dalam tindak pidana ini ketentuan saksi hendaklah berjumlah empat orang, Firman Allah SWT. QS. An-Nuur : 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢١﴾

*“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.*

Berdasarkan firman Allah tersebut maka sudah jelas mesti berjumlah empat orang, tidak ada kesaksian tanpa sepengetahuan dan tidak halal pula bagi seseorang untuk bersaksi apabila mereka tidak mengetahuinya. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya.

---

<sup>21</sup> Q.S. An-Nuur (24) : 4

Syarat dan ketentuan dalam Hukum Islam di tentukan sebagai berikut :

### 1. Al-Ishalah

Al-Ishalah adalah orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa zina. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah zina mesti asli, yaitu ia hendaklah menyaksikan langsung peristiwa zina. Dengan demikian menurut Imam Abu Hanifah tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Syiah Jaidiyah. Alasan tidak diterimanya saksi atas saksi (saksi) adalah karena hal itu menimbulkan subhat (keraguan), sedangkan ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam jarimah hudud sebab apabila terdapat subhat, hukuman had bisa gugur.

### 2. Kesaksian harus satu Majelis

Kesaksian yang diakui adalah kesaksian yang terjadi dalam sidang pengadilan, seperti definisi kesaksian yaitu menyampaikan kebenaran pada sidang pengadilan. Seandainya orang yang bersaksi menyampaikan kebenaran namun bukan di dalam sidang pengadilan, meski menggunakan lafadz-lafadz, “Saya bersaksi” dan dihadapan seorang yang qadli akan tetapi tidak berada di dalam sidang pengadilan maka hal itu tidak diakui sebagai kesaksian.<sup>22</sup>

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad memiliki pendapat yang sama bahwa bahwa persaksian mesti dikemukakan dalam satu majelis (persidangan). Tetapi Syi’ah Zaydiyah dan Zhoriyah tidak mensyaratkan, menurut mereka persaksian boleh dikemukakan secara terpisah atau bersama-sama di

---

<sup>22</sup>.[https://googleweblight.com/?lite\\_url=https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/24/hukum-pembuktian/](https://googleweblight.com/?lite_url=https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/24/hukum-pembuktian/) di akses tanggal 20 September 2017

dalam majelis (persidangan) atau dalam beberapa majelis (persidangan). Alasan mereka adalah bahwa persyaratan empat orang saksi yang disebutkan dalam surat an-nuur ayat 3 dan surat an-nisa ayat 15 tidak menyebutkan tentang majelis, melainkan hanya saksi saja. Oleh karena itu, walaupun persaksian dikemukakan bukan dalam satu majelis asal jumlahnya mencukupi yaitu empat orang maka persaksian tersebut dapat diterima.

### 3. Persaksian harus meyakinkan diterima dan dianggap sah oleh hakim

Persaksian dalam jarimah zina mesti jelas dan meyakinkan kepada hakim. Apabila persaksian itu tidak dapat diterima karena tidak meyakinkan maka persaksian tersebut tidak sah. Persaksian itu di tolak apabila terdapat perbedaan keterangan antara para saksi tentang perbuatannya, waktu terjadinya, atau tempatnya yang kira-kira menunjukkan kebohongan semua saksi atau sebagiannya. Untuk sahnya persaksian dalam meyakinkan hakim di syaratkan persaksian mesti menjelaskan tentang hakikat zina, kapan dilakukannya, dimana terjadinya, dan dengan siapa zina dilakukan. Oleh karena itu hakim hendaklah menanyakan kepada para saksi supaya keterangan benar-benar meyakinkan, sehingga vonis yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat.<sup>23</sup>

### C. Dasar Hukum Kesaksian

Kesaksian itu sangat diperlukan untuk memperkuat dan menentukan kebenaran, karenanya dalam hukum Islam telah ditetapkan dasar hukum yang mewajibkan saksi untuk memberikan kesaksiannya sehingga hakim dapat

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit. h. 49

menentukan dengan tepat keputusan yang dijatuhkan untuk perkara yang diadilinya.

### Dasar hukum saksi yang terdapat dalam Al-Qur'an

#### Surat An-Nissa ayat 15

... وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا

24



“ ... dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

#### Surat An-Nuur ayat 4

... وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

25



“ ... dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

#### Surat An-Nuur ayat 13

... لَوْلَا جَاءُوهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ

الْكَذِبُونَ



<sup>24</sup> Q.S. An-Nissa (04) : 15

<sup>25</sup> Q.S. An-Nuur (24) :4

“ ... mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta”.

### Dasar Hukum Saksi yang terdapat dalam Hadits

#### Hadist Nabi SAW

و عن انس بن مالك رضي الله عنها قال: اول لعان كان في الاءسلام ان شر يك بن سمحاء قد فاه هلال بن امية با مراته, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البينة, والا فحد في ظهرك. الحد يث اخرجه ابو يعلي, ورجا له ثقات.<sup>27</sup>

“dari Anas putra Malik r.a berkata, “Awal mula li'an dalam islam ialah perihal Syarik bin Sahma dituduh Hilal bin Umayyah telah berzina dengan istrinya. Maka Nabi SAW, “Tunjukkan bukti (saksi) dan jika tidak bisa maka punggungmu akan dikenai hukuman.” (Hadits ini diriwayatkan Abu Ya'la. Para perawinya dapat dipercaya). Hadits 1266

Hukum kesaksian itu fardhu'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allah SWT:

#### QS. Al-Baqarah:283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ

“ ... janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya ... “

<sup>26</sup> Q.S. An-Nuur (24) : 3

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surakarta: Insan Kamil, Solo : 2014), h. 493

<sup>28</sup> Q.S. Al-Baqarah (02) : 282

QS. Ath-Thalaq:2

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

“...tegakkan kesaksian itu Karena Allah...”

#### D. Syarat Saksi dalam Hukum Islam

Tidak semua orang dapat diterima untuk menjadi saksi. Ada syarat-syarat persaksian yang berlaku untuk semua jarimah, ada pula syarat-syarat khusus untuk persaksian jarimah zina. Meski dalam pembahasan ini penulis fokus pada syarat-syarat persaksian untuk jarimah zina, tetapi penulis akan membahas sedikit tentang syarat saksi untuk semua jarimah agar terlihat perbandingannya dengan jarimah-jarimah yang lain.

##### 1. Syarat Saksi untuk Jarimah

Diterimanya saksi dalam jarimah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Islam. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syurairi dan Ibrahim An-Nakha'i. ini adalah pendapat Al-Auza'i, berdasarkan firman Allah SWT. Surat Al-Maidah ayat 106-107

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِن أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثَمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ

<sup>29</sup> Q.S. At-Thalag (65) : 2



أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَأَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَئِينَ  
فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتِيهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ


30 

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

“ jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) membuat dosa, Maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian Kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan Kami tidak melanggar batas, Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang yang Menganiaya diri sendiri".

- b.) Adil. Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka, karena firman Allah SWT.

Surat At-Thalaq ayat 2

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... 

“ ... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. ... “

Surat Al-Baqarah ayat 282

<sup>30</sup> Q.S. Al-Maidah (05) :106-107

<sup>31</sup> Q.S. At-Thalaq (65) : 2

... مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ<sup>32</sup>

“ ... dari saksi-saksi yang kamu ridhai ... ”

Surat Al-Hujurat ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ...<sup>33</sup> ﴿٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti ... ”

Orang yang adil hendaklah mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Selalu menjauhi perbuatan dosa besar
2. Tidak selalu mengerjakan dosa-dosa kecil
3. Selamat aqidahnya
4. Tidak mudah marah
5. Menjaga kehormatan diri sepantasnya menurut ukuran orang sederajat dengan dia.<sup>34</sup>

Mengajukan kesaksian secara sukarela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam perkara adalah merupakan akhlak yang terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian adalah murni dan lahir dari hati nurani yang bersih dan belum dicampuri dengan berbagai persoalan yang lain.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Q.S. Al-Baqarah (02) : 282

<sup>33</sup> Q.S. Al-Hujurat (49) : 6

<sup>34</sup> Mustofa Diibul Bigha, *AT-Tahdzib*, Terj. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam (Surabaya : CV Bintang Pelajar, 1984), h. 516

<sup>35</sup> Ahmad Sukardja, Arifin Ishak, A. Khaeruddin, dll *bidang studi syari'ah*, (Jakarta : 1983), h. 129

- a.) Baligh dan Berakal. Apabila keadilan ini merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.
- b.) Berbicara. Sudah barang tentu saksi hendaklah dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara maka kesaksiannya tidak diterima.
- c.) Hafal dan Cermat. Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.
- d.) Bersih dari tuduhan. Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan.<sup>36</sup>

## 2. Syarat-syarat Khusus Saksi untuk Jarimah Zina

Selain syarat-syarat umum yang telah disebutkan di atas, untuk persaksian jarimah zina mesti dipenuhi syarat-syarat khusus, yaitu : Laki-laki karena menurut Jumhur fuqoha bahwa untuk saksi dalam jarimah zina disyaratkan mesti laki-laki semuanya. Jumhur fuqoha tidak menerima persaksian perempuan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sy'iah Zaydiyah. Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam jarimah zina tidak kurang dari empat orang, dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi persaksian dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagian perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang-kurangnya lima orang, terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan.

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 57

Akan tetapi menurut Imam Atha'a dan Imam Hammad, saksi dalam jarimah zina boleh tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan putra Hazm membolehkan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan.

#### **E. Macam-macam Bentuk Persaksian**

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai macam saksi, seperti :

##### **1. Kesaksian ahli dzimmah atas ahli dzimmah**

Secara istilah, *dzimmi* (bahasa arab *dzimmi* majemuk *ahlul dzimmah*, “orang-orang dzimmah”) adalah orang non-muslim merdeka yang hidup dalam Negara Islam yang, sebagai balasan karena membayar pajak seorangan, menerima perlindungan dan keamanan.<sup>37</sup> maka hal itu menjadi tempat perselisihan pendapat diantara para fuqoha. Asy-syafi’I dan Malik berkata : Tidak diterima kesaksian ahli dzimmah, baik atas orang muslim ataupun orang kafir. Ahmad berkata: Tidak diperbolehkan kesaksian ahli kitab terhadap sesamanya. Orang-orang Hanafi berpendapat: Kesaksian sebagai dari mereka atas sebagaian lainnya diperbolehkan, karena kekufuran itu semuanya adalah satu agama. Seorang Yahudi atas seorang Yahudi lainnya diperbolehkan; akan tetapi tidak diperbolehkan kesaksiannya atas seorang Nasrani dan Majusi, karena mereka berbeda agama. Dan tidak diperbolehkan kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lain.

##### **2. Kesaksian dari orang yang tidak dikenal**

---

<sup>37</sup>. <https://id.m.wikipedia.org> > wiki > Dzimmi, diakses tanggal 04 April 2017

Pada dasarnya, kesaksian dari orang yang tidak dikenal itu tidak dapat diterima. Telah bersaksi di hadapan Umar seorang lelaki, maka kata Umar kepadanya: Aku tidak mengenalmu. Akan tetapi tidak berbahaya bagimu bila aku tidak mengenalmu. Datangkanlah orang yang mengenalmu.

### 3. Kesaksian orang Badawi

Ahmad dan sekelompok dari sahabatnya, dan Abu Ubaidah serta riwayat dari Malik, berpendapat tentang tidak diterimanya kesaksian orang Badawi (yang mengembara, nomaden) terhadap penduduk kampung, karena hadits Abu Hurairah bahwa Nabi SAW. Bersabda :

و عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله قال : (( لا تجوز شهادة بدوي على صا  
حب قرية )) . رواه أبو داود, وابن ماجه .<sup>38</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah persaksian Arab Badui (Arab Dusun) terhadap orang kota." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah)*

Penolakan kesaksian orang badawi itu disebabkan kekasarannya, kebodohnya, dan kekurangtahuannya terhadap apa yang terjadi di kampung. Maka kesaksiannya tidak dapat dipercaya.

Yang benar ialah diperbolehkannya kesaksian orang badawi apabila dia adil dan disukai, karena dia orang-orang kita dan seagama dengan kita. Keumuman di dalam Al-Qur'an menunjukkan diterimanya kesaksian orang-orang yang adil, baik badawi ataupun penduduk kampung. Dan keadaannya sebagai

---

<sup>38</sup> Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Op.Cit, h. 565. Hadis nomor 1448, Bab Kesaksian.

orang badawi itu seperti keadaannya sebagai orang dari negeri lain. Demikianlah pendapat Asy-Syafi'I dan jumhur fuqoha.

#### 4. Kesaksian orang buta

Kesaksian orang buta itu diperbolehkan bagi Malik dan Ahmad, dalam hal yang cara kesaksiannya adalah pendengaran, bila dia mengenal suara. Oleh sebab itu maka kesaksian orang buta di terima dalam hal nikah, thalaq, jual-beli, pinjam-meminjam, nasab, waqaf, milik mutlak, ikrar, dan yang serupa itu, baik ia buta dikala menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian menjadi buta.

Berkata Ibnul Qasim: Aku berkata kepada Malik, "Orang itu mendengar tetangganya dari balik dinding, akan tetapi dia tidak melihatnya. Dia mendengar tetangganya menceraikan istrinya, lalu dia menjadi saksinya. Dia mengetahui dari suara." Malik berkata: Kesaksiannya itu diperbolehkan.

Aliran Syafi'I berkata: Tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam lima tempat: nasab, kematian, milik mutlak, riwayat hidup, dan tepatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum dia buta. Abu Hanifah berpendapat: Tidak diterima kesaksian orang buta sama sekali.

#### 5. Nishab Kesaksian

Kesaksian itu adakalanya mengenai hak-hak yang bersifat harta benda, badani, hudud, atau qishash. Masing-masing dari keadaan ini mempunyai sejumlah saksi yang tidak boleh tidak, sehingga dakwaan itu ditetapkan. Berikut ini penjelasan mengenai kesaksian untuk masalah-masalah di atas yang sebagaimana dijelaskan berikut:

##### a.) Kesaksian empat orang saksi

Nishab dari kesaksian mengenai had zina itu empat orang lelaki dewasa, karena firman Allah SWT.

QS. An-Nissa ayat 15

... وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ <sup>39</sup>

“ .. dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)”.

QS. An-Nuur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ <sup>40</sup>

“ ... dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, ... “

QS. An-Nuur ayat 13

... لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ <sup>41</sup>

“ ... mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? “

b.) Kesaksian tiga orang saksi

Orang-orang Hambali berkata: Sesungguhnya seseorang yang telah diketahui bahwa dia itu kaya, apabila dia mendakwakan bahwa dirinya fakir karena enggan membayar zakat, dakwaannya itu tidak diterima kecuali bila dia mengajukan tiga orang saksi lelaki atas dakwaannya ini. Untuk pendapatnya ini, mereka beralasan dengan hadits Qubaishah bin Mukhariq:

عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضى الله عنه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال, قم حتى تأتينا اصدقة فنا

<sup>39</sup> Q.S. An-Nissa (04) : 15

<sup>40</sup> Q.S. An-Nuur (24) : 4

<sup>41</sup> Q.S. An-Nuur (24) : 13

مر لك بها. ثم قال: يا قبيصة, ان المسألة لا تحل الا لحد ثلاثة رجل تحمل  
 حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جأحة  
 اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى قواما من عيش اوسدادا من عيش.  
 ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد اصابنا  
 فلانا فاقة, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما اوسدادا من عيش فما سوا  
 هن من المسألة يا قبيصة سحتا ياكلها صا حبا سحتا. رواه مسلم وابو  
 داود و انس الى

*Dari Qubaishah bin Mukhariq Al-Hilali r.a., dia berkata : Aku menanggung beban hutang, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Meminta harta untuk membayar hutang itu. Maka kata beliau: “Tinggallah di sini, sehingga datang kepada kami zakat, akan aku berikan zakat itu kepadamu.” Kemudian beliau berkata: “Wahai Qubaishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari ketiga orang ini. Orang yang menanggung beban hutang, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia mendapatkannya, lalu ditinggalkan meminta-minta itu. Orang yang ditimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia mendapatkan pegangan kehidupan atau kebaikan kehidupan. Dan orang yang ditimpa oleh kemiskinan sehingga berkata tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata bahwa si fulan telah ditimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sehingga dia memperoleh pegangan atau kebaikan kehidupan. Selain meminta-minta dari tiga orang ini, wahai Qubaishah, adalah haram. Orang yang memintanya berarti memakannya secara haram.”*

HR Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai.

#### c.) Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita

Kesaksian dua orang laki-laki tanpa wanita itu diterima dalam semua hak, dan dalam hudud kecuali zina yang mempersyaratkan empat orang saksi. Kesaksian wanita dalam hal hudud itu tidak diperbolehkan menurut para fuqaha pada umumnya berbeda halnya dengan aliran zhahiri. Firman Allah SWT dalam hal thalak dan ruju’

QS Ath-Thalaq ayat 2



وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ۖ <sup>42</sup>

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...”

روى البخارى و مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شعث  
بن قيش: شا هداك لو يمينه.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Berkata kepada Al-Asy'ats bin Qais: “Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya.”

d.) Kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan

Firman Allah SWT. QS Al-Baqarah ayat 282

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ <sup>43</sup>

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. ...”

e.) Kesaksian seorang lelaki

Kesaksian seorang lelaki yang adil itu diterima di dalam hal ibadah, seperti adzan, shalat dan puasa. Ibnu ‘Umar berkata:

و عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال , فاخبرت رسول الله اني را  
يته , فصام , و امر الناس بصيامه . رواه ابو داود , وصححه ابن حبان ,  
والحاكم. <sup>44</sup>

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, “Orang-orang melihat hilal (bulan sabit), lalu aku beritahukan kepada Nabi SAW bahwa aku benar-benar telah melihatnya.

<sup>42</sup> Q.S. Ath-Thalaq (65) : 2

<sup>43</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 282

<sup>44</sup> Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *OpCit*, h. 250. Hadits nomor 676, Bab Puasa

*Lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa.” (Diriwayatkan Abu Dawud. Hadits ini shahih menurut Hakim dan Ibnu Hibban).*

f.) Kesaksian atas persusuan

Ibnu ‘Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan yang menyusui itu dapat diterima; berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

ان عقبه بن الحارث تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب فجاءت امرأة فقال لها: قد ارضعتكما فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف؟ وقد قيل؟ ففارقتها عقبه فنكحت زوجها غيره

*Bahwa ‘Uqbah ibnul Hadits menikah dengan Ummu Yahya binti Ihab; lalu datanglah seorang perempuan, dan katanya aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian ‘Uqbah menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau menjawab: “Bagaiman engkau menggaulinya, sebab telah dikatakan bahwa engkau adalah saudara sepersuannya?” Lalu Ummu Yahya diceraikan oleh ‘Uqbah, dan nikah dengan suami yang lainnya.*

Berkata orang-orang Hanafi: persusuan itu seperti halnya urusan lain, ia memerlukan kesaksian dari dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan; dan tidak cukup dengan kesaksian perempuan yang menyusui, karena kesaksiannya itu hanya pengakuan atas perbuatannya.

g.) Kesaksian atas Kelahiran

Ibnu Abbas memperoleh kesaksian qabilah (dukun, bidan) yang melahirkan atas kelahiran anak. Telah diriwayatkan dari Asy-Sya’bi dan An-Nakha’I dan diriwayatkan pula dari Ali dan Syuraih bahwa keduanya memutuskan dengan cara ini.

Malik berpendapat bahwa diperlukan kesaksian dua orang perempuan seperti halnya persusuan. Asy-Syafi’I membiasakan untuk menerima kesaksian dari kaum wanita dalam hal kelahiran, akan tetapi dia mempersyaratkan kesaksian

empat orang perempuan. Abu hanifah berkata: Kelahiran itu ditetapkan dengan kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, sebab kelahiran itu menetapkan warisan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 59

### BAB III

#### SAKSI MENURUT HUKUM POSITIF

##### A. Saksi dalam Hukum Positif

Saksi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>46</sup>

Yang dimaksud saksi menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>47</sup>

Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- a. orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)
- b. orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi
- c. orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa
- d. keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui
- e. bukti kebenaran

---

<sup>46</sup> UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban OpCit

<sup>47</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: Titik Terang, 1995), h.15

- f. orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di dengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri<sup>48</sup>

Berdasarkan kamus hukum saksi adalah orang yang terlibat atau dianggap mengetahui terjadinya sesuatu tindak pidana, kejahatan atau suatu peristiwa. Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>49</sup>

Dalam pasal 1 butir 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat-syarat dari saksi diantaranya :

- a. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri suatu tindak pidana
- b. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
- c. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana<sup>50</sup>

Saksi yang dimaksudkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah salah satu bukti dalam memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, ia lihat sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

### 1. Asas-asas Hukum Saksi

Dalam hukum Islam asas berasal bahasa Arab, *asasun* yang artinya dasar, basis, pondasi. Jika dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas

---

<sup>48</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 770

<sup>49</sup> Drs. Zulkifli dan Jimmy P, *Kamus Hukum* ( Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h.349

<sup>50</sup> KUHP Op.Cit

adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>51</sup>

Hukum mempunyai tujuan, yang sesuai dengan asas-asas hukum sehingga tujuan hukum itu dapat terlaksana. Saksi dan korban juga memiliki asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Asas-asas tersebut yaitu:

- a.) Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap manusia khususnya sebagai saksi dan/atau korban, sebagai makhluk ciptaan Allah, yang harus dihargai dan dilindungi, dan hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
- b.) Asas rasa aman adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban, berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tentram baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik maupun psikis.
- c.) Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya, secara proporsionalitas, procedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam setiap tahap peradilan.
- d.) Asas tidak diskriminatif adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap saksi dan/atau korban memperoleh pengakuan yang dalam keadaan sama, harus diterapkan secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, agama, suku bangsa dan sebagainya.
- e.) Asas kepastian hukum adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

---

<sup>51</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.126

Apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum, bahwa pada hakikatnya sasaran studi ilmu hukum meliputi tiga hal, yakni kaidah hukum yang di dalamnya meliputi asas hukum, kaidah hukum itu sendiri, dan peraturan hukum yang konkret. Kaidah, yang diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seharusnya dapat berbuat atau tidak berbuat agar kepentingan tersebut terlindungi dari gangguan atau serangan. Kaidah merupakan pandangan objektif masyarakat tentang apa yang seyogianya diperbuat atau tidak diperbuat. Kaidah hukum atau disebut atau disebut pula dengan norma hukum. Suatu asas hukum akan melahirkan norma hukum, selanjutnya norma hukum akan melahirkan aturan-aturan hukum.

Dengan demikian, secara hierarki, maka asas hukum akan melahirkan norma hukum, serta norma hukum akan melahirkan aturan hukum.<sup>52</sup>

## **2. Peranan Saksi dalam Hukum**

Perlindungan terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana. Landasan hukum bagi perlindungan saksi dan korban adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 UUD 1945.

Keterangan saksi korban merupakan informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang korban kejahatan. Untuk kepentingan lebih luas (kriminologi), keterangan saksi korban ini untuk melihat tidak hanya sekadar mengkaji sebagai korban kejahatan konvensional, tetapi juga untuk melihat tentang korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK (Perlindungan Saksi Korban), diharapkan lebih mendorong masyarakat, khususnya saksi dan korban untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis,

---

<sup>52</sup>Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika.2012), h. 246

sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari kekerasan, serangan dan pembalasan dari pihak-pihak tertentu.

Peranan saksi dan korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional yang melibatkan dirinya sebagai korban. Keterlibatan ini penting untuk bahan mengukur suatu keterlibatan dan peran serta tanggung jawab dalam hal terjadinya peristiwa pidana. Sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang LPSK, maka saksi dan korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dideritanya, sesuai dengan taraf keterlibatannya atau partisipasi serta peranannya dalam hal terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut.

Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pihak negara melalui Jaksa Penuntut Umum jelas berkepentingan untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dengan mengajukan terdakwa (pelaku) dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Saksi wajib memberikan kesaksian dan bahkan dapat dipanggil paksa untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Hakim yang dapat memerintahkan agar saksi yang telah dipanggil dengan patut dihadapkan ke persidangan, karena keterangan yang diberikan saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan nanti.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa keterangan para saksi baik *a charge* maupun *a de charge* sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tidak saja derajat kesalahan terdakwa namun juga tentang apakah terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Dengan kata lain, peran kesaksian sangat penting sehingga pemberian kesaksian sangat penting sehingga pemberian kesaksian dirumuskan sebagai suatu kewajiban hukum.

Dalam sejumlah kasus dapat saja terjadi termasuk saksi korban terintimidasi oleh masa pendukung terdakwa yang sengaja dihadirkan dalam



persidangan. Sekalipun secara resmi kehadiran mereka dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, hanyalah dalam rangka menunjukkan solidaritas, namun tak pelak bagi saksi kehadiran mereka di ruang persidangan terutama tatkala ia didengar keterangannya sebagai saksi akan membuatnya sangat tidak nyaman bahkan merasa terancam. Jangkauan perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 bahwa saksi dan korban berhak untuk menuntut jaminan dapat mengganti identitas dan tempat kediaman

Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diberikan. Tuntutan dari keberadaan saksi adalah pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan keterangannya dengan keadaan intimidasi, takut, atau khawatir akan efek dari keterangannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau saksi juga menuntut bahwa mereka perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan.

Saksi tidak boleh ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa atau siapa saja yang bisa terkait dengan tindak pidana yang disaksikannya. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 173 KUHP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara leluasa tanpa rasa takut/khawatir ataupun tertekan.

Oleh sebab itu penegak hukum dapat memberikan rasa aman dan bebas kepada saksi pada saat diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang jelas dan benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, sekalipun keterangan itu memberatkan terdakwa. Kesaksiannya tersebut dapat secara tertulis disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut ataupun

kesaksiannya didengar secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Dengan lahirnya, UU No. 13 tahun 2006 tentang PSK, diharapkan lebih mendorong masyarakat, khususnya saksi dan korban untuk berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya prosedur/peraturan yang menciptakan rasa aman dan terlindungi.

### 3. Macam-macam Saksi

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh itu jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai saksi diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu,<sup>53</sup> maka terhadap saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

#### a.) Yang Memberatkan (*A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.<sup>54</sup> Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam persidangan dia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum di persidangan ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban. Adapun saksi utama yang memberatkan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini dapat saja saksi ini berperan penting bagi jaksa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa.

#### b.) Saksi yang Meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan bagi tersangka, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka itu melakukan tindak pidana. Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa (tersangka) atau penasihat hukum pada waktu sidang di pengadilan. Pasal 65 KUHP

---

<sup>53</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Sumur, 1977), h.110

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, (Bogor:Politea,1982), h. 54

mengatakan: “Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya”. Saksi *a de charge* dapat diajukan oleh tersangka pada penyidikan. Penuntut umum boleh mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan dengan mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Hakim dalam hal pengajuan saksi ini sangat berperan, dimana dia harus dapat menentukan saksi-saksi mana yang diperbolehkan untuk memberikan keterangan dipersidangan, seperti yang telah diatur dalam KUHP mulai pasal 159-179 tentang saksi.

c.) Saksi Ahli

Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini diatur dalam KUHP pada pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan ahli di dalam praktek persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum.

d.) Saksi Mahkota

Saksi mahkota di salahartikan di Indonesia. Seakan-akan para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian bergantian menjadi saksi, disebut saksi mahkota. Ini merupakan kekeliruan besar, terdakwa bergantian menjadi saksi atas perkara yang dia sendiri ikut serta didalamnya. Sebenarnya bertentangan dengan larangan mendakwa diri sendiri (*selfincrimination*), karena dia sebagai saksi akan disumpah yang dia sendiri juga menjadi terdakwa atas perkara itu. Terdakwa tidak disumpah, berarti jika dia berbohong dapat dikenai sumpah palsu. Jadi, bergantian menjadi saksi dari para terdakwa berarti

mereka didorong untuk bersumpah palsu, karena pasti akan meringankan temannya, karena dia sendiri juga ikut serta melakukan delik itu, atau cuci tangan dan memberatkan terdakwa.

Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Nederland, yaitu salah seorang terdakwa yang paling ringan perannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Dalam hal saksi mahkota, syaratnya ialah dia bersedia membongkar komplotan itu. Di Italia sudah diciptakan suatu undang-undang mengenai saksi mahkota. Jika terdakwa yang paling ringan kesalahannya dalam komplotan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa mendapat pidana karena perbuatannya juga dipandang serius, maka jaksa dapat berunding dengan dia jika dia bersedia membongkar jaringan komplotan itu dia akan dituntut pidana lebih ringan dibanding teman berbuatnya.

Jadi, ini mirip dengan *plea bargaining* di Amerika Serikat yang jaksa dapat berunding dengan terdakwa, jika terdakwa mengaku, akan dikurangi tuntutan terhadapnya. Perbedaannya, ialah *plea bargaining* ini tidak perlu delik dilakukan beberapa orang, bisa juga dia sendirian pelakunya. Jaksa akan memberitahu hakim agar pidana terhadap terdakwa dikurangi.<sup>55</sup>

e.) Saksi Kolaborator (*Justice Collabulator*)

*Justice Collabulator* memang istilah yang diadopsi dari sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Di Indonesia istilah sesungguhnya adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Saksi pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2012), h.271

aset hasil suatu tindak pidana serius dan teroganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, *Justice Collabulators* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi yang bekerjasama (*Justice Collabulators*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

## **B. Perlindungan Saksi dalam Hukum Positif**

Sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang ada saksi juga harus mendapatkan perlindungan, saat ini juga sudah terdapat UU yang mengatur tentang Perlindungan Saksi, yaitu UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga mandiri yaitu lembaga independent tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Lembaga ini berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh

---

<sup>56</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, satgas PMH, Cetakan kedua, 2011, h.10

LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Tetapi dalam pelaksanaannya perlindungan saksi masih belum di terapkan dan banyak saksi-saksi yang tidak mendapat perlindungan, padahal dengan adanya saksi yang memberikan kesaksiannya terhadap suatu tindak pidana dapat memecahkan suatu perkara tersebut.<sup>57</sup> Berikut ini akan diuraikan pengaturan tentang perlindungan saksi dalam hukum positif di Indonesia sebagai berikut:

1. Perlindungan Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan saksi dalam KUHP ini tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur dalam KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian.

2. Perlindungan Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Perlindungan terhadap saksi tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Seharusnya perlindungan terhadap saksi diatur dalam KUHAP sebagai suatu hukum acara pidana yang sifatnya umum. Meskipun dalam KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi, namun demikian terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana<sup>58</sup>

3. Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus

Sejak 1997 beberapa undang-undang tindak pidana khusus diluar KUHP mencantumkan beberapa pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi, yaitu :

- 1.) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam UU ini diatur dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bentuk perlindungan khusus dalam pasal 5

---

<sup>57</sup><http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/03/perlindungan-saksi-dalam-peradilan.html?m=1> diakses tanggal 29 September 2016

<sup>58</sup>KUHAP, OpCit, h.83

- 2.) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam UU ini diatur lebih rinci dalam pasal 34. Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus memberikan seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya diproses peradilan pidana. Dalam hal ini saksi adalah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga justru saksi tersebut akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan. Dengan demikian saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian demi memberantas kejahatan dalam masyarakat, sebab setiap orang berkewajiban untuk ikut serta memberantas kejahatan dalam masyarakat.

- 3.) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 31

- 4.) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diubah dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dalam undang-undang Psikotropika di atur dalam Pasal 54

- 5.) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM berat. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Latar belakang dibuatnya peraturan pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, terror atau kekerasan dari pihak manapun.

- 6.) Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini memberikan

pengaturan yang lebih luas tentang saksi, saksi pelaku, korban dan pelapor dalam tindak pidana.<sup>59</sup>

Latar belakang adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah minimnya perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan yang kerap diintimidasi oleh pelaku atau suruhannya, khususnya kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan korupsi, narkoba, pelanggaran HAM dan tindak pidana berat lainnya. Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan saksi dan korban bisa lebih berani dan berperan dengan mengungkapkan kronologis sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa perlindungan hukum terhadap saksi sangat tidak efektif, kondisi hukum seperti ini bagaimana dapat menunjang peran penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri, dalam rangka keikutsertaan melaporkan kejahatan itu, khususnya dalam pemberian jaminan perlindungan keamanan dan jaminan hukum. Pembahasan tentang pemberian perlindungan saksi dan korban, maka harus dipahami terhadap kedudukan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, yang dapat ditelusuri melalui peranan serta hak dan kewajiban para saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.<sup>60</sup> Oleh sebab itu, masyarakat harus turut serta mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum dalam membuat peraturan-peraturan terlebih tentang perlindungan saksi. Karena melihat dari peranan saksi tersebut sangat membantu dalam suatu persidangan tindak pidana, sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi.

---

<sup>59</sup>UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

<sup>60</sup> Op.Cit *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, h. 47



Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan bahwa LPSK saat ini, sedang berupaya menyusun suatu peraturan sistem manajemen SDM yang diharapkan mampu menciptakan tata kerja dan peningkatan kinerja lembaga. Untuk mendukung hal ini, LPSK menyadari bahwa penguatan kapasitas internal tidak terlepas dari dukungan SDM yang kompeten sebagai pelaksana aktivitas perlindungan. Apabila LPSK didukung oleh SDM yang berkompentensi tinggi serta tertata baik, tentunya tugas dan fungsi serta peranan LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini sesuai dengan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal pemidanaan yang tidak berorientasi pada sistem retribusi (pembalasan) yang berupaya memidanakan orang sebanyak mungkin.

### **C. Hak dan Kewajiban Saksi**

Sesuai dengan pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*.

Pada dasarnya menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam pasal 224 KUHP yang berbunyi :

*Barang siapa dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :*

1. *Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan*

2. *Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan*

R. Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini orang itu harus :

- a.) dipanggil menurut undang-undang (oleh hakim) untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana, maupun dalam perkara perdata; dan
- b.) dengan sengaja tidak memenuhi (menolak) suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menterjemahkan.

Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas bahwa seseorang yang dipanggil sebagai saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir. Hal ini juga dapat dilihat dalam pasal 112 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

### **1. Kewajiban Saksi**

Pasal 160 ayat 3 KUHP yang berbunyi

- a. “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya
- b. Pasal 167 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

“setelah saksi member keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang member izin untuk meninggalkannya.

- c. Pasal 167 ayat 3 KUHAP yang berbunyi :  
“para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap

## 2. Hak Saksi

- a.) Pasal 112 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :  
Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut
- b.) Pasal 113 KUHAP yang berbunyi :  
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil member alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.
- c.) Pasal 117 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :  
Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun
- d.) Pasal 118 ayat 2 KUHAP yang berbunyi :  
Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangan, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- e.) Pasal 166 KUHAP yang berbunyi  
Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi
- f.) Pasal 177 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :  
Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- g.) Pasal 178 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.<sup>61</sup>

#### **D. Kedudukan Saksi**

Analisis terhadap kedudukan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, yang menjadi objek perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian dari kriminologi. Dalam pembahasan ini yang menjadi masalah adalah kedudukan saksi berdasarkan jenis kelamin, apakah kesetaraan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan itu menjadi permasalahan dalam hukum positif. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan setengah dengan kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam kitab fiqh maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharuan atau kelompok Islam progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki. Maksud pembacaan ulang ini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku di setiap zaman dan tempat.

Berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sorotan bias gender, ada dua teori besar yaitu, *nature dan nurture*. Teori pertama, *nature*, mengatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan sederhana perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam menentukan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, *nurture*, mengatakan bahwa

---

<sup>61</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana> diakses tanggal 29 september 2016

perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Sistem pembuktian dalam hukum Islam tidak menganut teori-teori pembuktian pada umumnya seperti sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya.

Kedudukan hubungan antara para pelaku kejahatan dengan saksi atau korban dalam suatu peristiwa pidana dan keberhasilan pengungkapan peristiwa pidana tersebut tidak hanya jasa dari penegak hukum, disadari atau tidak bahwa keberhasilan pengungkapan pidana ini juga merupakan peran serta dan tanggung jawab hukum dari para saksi dan korban yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana tersebut. Saksi dan korban dalam hubungannya dengan peristiwa pidana menjadi suatu permasalahan sebagai akibat dalam suatu sistem pembuktian peristiwa pidana. Dalam suatu peristiwa pidana yang mempunyai jaringan kuat, maka masalah pembuktian semakin mendapat kendala, maka peranan saksi dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP KETENTUAN SAKSI TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. Tentang Keharusan Adanya Saksi

Kedudukan saksi dalam Al-quran adalah sebagai rukun dan mesti berjumlah dua orang laki-laki. Ketentuan *qath'I* ini mesti dilakukan seperti apa adanya karena objek kesaksiannya adalah persoalan yang penting, sehingga tanpa kehadiran saksi berakibat tidak sahny suatu perbuatan hukum. Berbeda dengan saksi dalam Hukum Positif yang berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang berperan untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum, sehingga status kesaksian pun tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata hanya sebagai salah satu alat bukti, nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama tidak membedakan kesaksian karena berbedanya jenis kelamin. Perkara-perkara yang disaksikan adalah melingkupi semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali adanya undang-undang yang menyatakan lain.

Titik temu status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama dengan Alquran adalah :

- a. Dengan berbedanya kedudukan saksi sebagai rukun dan saksi sebagai alat bukti menyebabkan berbeda pula fungsi antara keduanya. Saksi sebagai rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara

saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan;

- b. Istilah alat bukti tidak ditemukan dalam Alquran kecuali melalui hadis Nabi dengan lafal *al-bayyinah*. Kendati lafal tersebut dimaknai berbeda oleh para pakar, tetapi lafal ini dapat juga dapat dimaknai sebagai alat bukti, sehingga istilah ini pun dikenal dalam Islam;

Dalam Hukum Acara Perdata, yang diutamakan dalam pembuktian adalah bukti surat atau tulisan, dan apabila diperlukan pembuktian saksi, barulah saksi digunakan. Islam tidak membedakan seperti yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata, tetapi apabila dikaji Islam pun telah lama memperkenalkan pembuktian melalui dokumen sebagaimana pada Q.S. al-Baqarah (2) : 282 tentang pencatatan;

Hukum Acara Perdata mewajibkan menghadirkan saksi, Alquran pun sejak lama mengharuskannya. Bedanya, saksi dalam Hukum Acara Perdata untuk menyampaikan kesaksian, sementara saksi dalam Alquran untuk menyaksikan akad atau transaksi yang berlangsung. Dalam hukum positif saksi untuk menyampaikan kesaksian sama seperti halnya dalam hukum acara perdata, karena digunakan untuk menyampaikan kesaksiannya.

Apabila saksi diposisikan sebagai rukun, maka semua ulama sepakat tidak menerima saksi dari non-muslim. Berbeda halnya apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka menurut mazhab Hanafi dan Ibn Qayyim serta dalam Hukum Acara Perdata kesaksian non-muslim diterima. Jumlah saksi sebagai

rukun mesti dua orang laki-laki dan jika tidak ada saksi dapat dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Berbeda apabila saksi sebagai alat bukti, maka yang diutamakan adalah kredibilitas keterangan yang diberikan sehingga siapa pun berhak memberikan kesaksian, bahkan tidak membedakan jenis kelamin.

Selain ketentuan saksi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif penulis juga mengkaji ketentuan perzinahan dalam hukum Islam dan hukum positif karena permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah “Analisis Terhadap Ketentuan Saksi Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jadi dalam tindak pidana zina ini harus terdapat saksi untuk membenarkan tindak perzinahan tersebut, sedangkan perzinahan itu sendiri berbeda konteksnya dalam hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam perzinahan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti dalam ketentuan hukum Islam yaitu: bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*), maka ia dihukum mati dengan cara dirajam, sedangkan pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*), dicambuk 100 kali.

Perzinahan dalam hukum Islam maupun hukum positif (KUHP) sama-sama memiliki proyeksi pembahasan yang substansial. Dari kedua hukum tersebut tampak adanya kontroversi yang seakan-akan melenceng dari khazanah keagamaan, khususnya Islam yang notabene merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam KUHP hanya melarang adanya tindak pidana zina



yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya sudah terikat tali perkawinan dan tidak melarang adanya tindak pidana zina antar dua orang yang berlainan jenis dan belum terikat tali perkawinan. Bagi orang yang sudah terikat tali perkawinan tindak pidana zina merupakan delik aduan yang harus diadukan oleh suami atau istri dari orang yang melakukan zina tersebut.

Mekanisme tersebut secara jelas tercantum dalam KUHP dengan sangat rinci. Tentunya ketentuan tersebut berbeda dengan Hukum Islam yang secara garis besar menentang segala bentuk perzinahan yang dilakukan oleh siapapun, sudah berkeluarga atau tidak, selama belum terjalin akad nikah yang sah maka hubungan layaknya suami istri tergolong perzinahan. Melihat dari uraian tersebut sudah sangat jelas perbedaan yang nyata antara pengertian perzinahan menurut hukum Islam dan hukum positif, begitupun perbedaan saksi untuk tindak pidana zina. Meski dalam hukum Islam dan hukum positif tidak ditentukan secara jelas perbedaan saksi untuk tindak pidana zina ini, tetapi semua saksi dalam tindak pidana hukum Islam maupun hukum positif sudah terlihat adanya perbedaan yang sangat signifikan.

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan yang telah di bahas mengenai perbedaan saksi dan perbedaan pengertian perzinahan dalam hukum Islam dan hukum positif, dapat diketahui bahwa penjelasan-penjelasan berdasarkan saksi dan pengertian perzinahan lebih tegas dan kompleks dalam hukum Islam ketimbang dalam hukum positif. Hukum Islam sangat tegas menghukum bagi siapapun pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) atau yang sudah

menikah (*muhsan*) agar mereka dapat dihukum sesuai dengan aturan dan syariat Islam yang ditetapkan. Sedangkan hukum positif hanya mengatur tentang tindak pidana zina yang sudah menikah dan salah satu dari suami atau istri mereka melaporkan adanya suatu tindak pidana zina tersebut, apabila tidak ada yang melaporkan tentang tindak pidana zina tersebut maka pelaku tidak dapat dikenakan hukum sesuai dengan KUHP.

Dari analisis yang penulis jabarkan diharapkan adanya pembaharuan-pembaharuan yang lebih signifikan dalam membuat peraturan-peraturan terlebih lagi tentang tindak pidana zina, agar masyarakat lebih peduli terhadap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang akan mereka lakukan, apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak, sehingga ke depannya di harapkan tidak lagi terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma susila. Hal ini di anggap penting, karena masyarakat luas memandang bahwa tindak perzinahan merupakan suatu hal yang tabu sehingga di perlukan adanya saksi untuk mengungkapkan sebuah tindak pidana zina.

## **B. Tentang Jumlah dan Jenis Kelamin Saksi**

Dalam perspektif *maslahhah* saksi sebagai alat bukti mengandung kemaslahatan yang sangat besar. kedudukan perempuan sebagai saksi di pengadilan agama nilainya setengah dari kesaksian laki-laki. Apabila perempuan ini menjadi saksi maka objek kesaksiannya hanya berhubungan dengan harta dan pada kasus yang hanya diketahui oleh kaum perempuan secara umum. Selain itu dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki. Kesaksian perempuan

tidak diterima dalam masalah rujuk, *hudud* dan *qishas*. Kesaksian laki-laki dan dua orang perempuan berlaku juga pada kesaksian masalah sumpah.

Seperti yang telah diketahui saksi dalam Hukum Positif berkedudukan sebagai salah satu alat bukti, sehingga perbedaan jenis kelamin itu tidak berpengaruh pada kesaksiannya. Yang dapat mempengaruhi kesaksian tersebut hanyalah apabila dia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan, berdasarkan KUHP Pasal 242 apabila seseorang dengan sengaja memberikan keterangan palsu maka ia di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila kesaksian tersebut merugikan pihak terdakwa atau tersangka maka ia dihukum selama-lamanya sembilan tahun.

Saksi dua perempuan tidak selalu disetarakan dengan satu saksi laki-laki. Dalam Al-Qur'an yang mengatakan dua saksi wanita setara dengan satu saksi laki-laki terdapat di surat Al-Baqarah, surat ke-2 ayat 282. Ini adalah ayat terpanjang di Al-Qur'an tentang transaksi finansial. Ayat ini hanya berkaitan dengan perjanjian dalam transaksi keuangan. Dalam kasus tersebut, sangat disarankan untuk membuat perjanjian tertulis, antara dua belah pihak dan mengambil dua saksi, sebaiknya keduanya laki-laki. Jika tidak mendapatkan dua laki-laki, maka satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sudah cukup.

Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa sikap feminine juga dapat berpengaruh terhadap kesaksian dalam kasus pembunuhan. Dalam keadaan seperti itu seorang perempuan lebih takut dibanding seorang laki-laki. Karena kondisi emosional seperti itu dia bisa bingung. Oleh karena itu, menurut beberapa ahli

hukum, dalam kasus pembunuhan, dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki. Dalam semua kasus lainnya, satu saksi perempuan setara dengan satu saksi laki-laki.

Aisyah RA, istri Nabi tercinta, telah meriwayatkan tidak kurang dari 2.220 hadits yang diterima kesahihannya hanya berdasarkan pada kesaksian beliau. Hal ini merupakan bukti yang cukup bahwa kesaksian seorang perempuan juga dapat diterima. Banyak ahli fiqih setuju, seorang saksi perempuan sudah cukup dalam penentuan hilal (kemunculan bulan sabit kecil di awal bulan). Bayangkan, seorang saksi perempuan cukup untuk penentuan salah satu rukun Islam, yaitu (penentuan awal) puasa Ramadhan, dan seluruh komunitas muslim baik laki-laki maupun perempuan, setuju dan menerima kesaksiannya! Beberapa ahli fiqih mengatakan bahwa seorang saksi diperlukan pada penentuan awal Ramadhan dan dua orang saksi pada penentuan akhir Ramadhan. Tidak ada bedanya apakah saksi tersebut laki-laki atau perempuan.

Dalam beberapa kasus, hanya diperlukan kesaksian dari perempuan sedangkan kesaksian dari laki-laki tidak dapat diterima. Dalam penanganan masalah-masalah perempuan, misalnya dalam memandikan (ghusl) jenazah perempuan, saksi harus seorang perempuan. Ketidak-setaraan yang sepertinya tampak dalam transaksi keuangan bukan karena adanya ketidaksetaraan gender dalam Islam. Hal itu terjadi hanya karena adanya perbedaan kodrat dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, seperti yang digambarkan dalam Islam.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan saksi tersebut perbedaan jenis kelamin merupakan sesuatu yang *qoth'I* karena faktanya beberapa ulama mempunyai pemikiran bahwa kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki dalam bidang hukum keluarga seperti saksi pada akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus *hudud* dan *qishas*.

Dalam hal perekonomian, jarimah hudud dan qishas kesaksian perempuan dianggap separo dari kesaksian laki-laki, dan kesaksiannya harus disertai dengan minimal satu orang laki-laki. Keadaan yang membolehkan perempuan menjadi saksi tanpa disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki, dalam masalah seperti ini semua mazhab menerima persaksian perempuan, di antara tempat-tempat itu ialah saat kelahiran bayi, cacat yang ada ditubuh seorang perempuan, keperawanan, hilangnya keperawanan, menstruasi, susuan dan sejenisnya. Maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan mendengar keterangan saksi dua orang perempuan belaka.<sup>62</sup>

Status kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata perspektif *masalah* adalah :

- a. Kedudukan saksi sebagai alat bukti termasuk kajian *masalah al-mursalah* yakni tidak ditemukan secara eksplisit nas memberikan dukungan atau pun menolaknya, tetapi apabila dikaji kembali secara keseluruhan, eksistensi

---

<sup>62</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, H.82

saksi sebagai alat bukti mengandung kemaslahatan yang sangat besar dan secara general, nas memberikan dukungan terhadap saksi sebagai alat bukti;

- b. Persamaan nilai kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti tampaknya tidak bertentangan dengan beberapa ukuran standar metode *masalahah*. Selain itu, yang dilihat bukan siapa yang memberikan kesaksian beserta jumlah saksi karena berbedanya jenis kelamin, tetapi yang menjadi perhatian utama adalah materi kesaksian yang diberikan. Apabila materi kesaksian tersebut adalah yang sebenarnya, akurat dan kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka pembuktian tersebut diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perbedaan jenis kelamin masih menjadi perdebatan oleh beberapa ulama, karena ada sebagian ulama yang membolehkan saksi berjenis kelamin perempuan tetapi hanya untuk menjadi saksi dalam hal akad dan menyaksikan transaksi tidak untuk menjadi saksi tindak pidana yang kesaksiannya di perlukan dalam persidangan guna mencari keadilan. Berbeda halnya dalam Hukum acara perdata, kedudukan saksi sebagai alat bukti tidak menjadi perdebatan, persamaan kesaksian laki-laki dan perempuan sebagai alat bukti tampaknya tidak bertentangan, yang menjadi perhatian utama adalah kesaksian yang diberikan tersebut merupakan kesaksian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Masalah kesaksian ini dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya di jelaskan semua orang yang cakap menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksiannya di muka hakim atau dapat meminta

untuk dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Hal ini sesuai dengan KUHPer, yang berbunyi: “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, di haruskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

- a. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak
- b. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- c. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.<sup>63</sup>

Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki ataupun saksi perempuan, selain orang yang masih ada hubungan darah, larangan untuk menjadi saksi menurut KUHPerdata ini hanya ditujukan untuk orang yang usianya belum genap lima belas tahun, orang-orang yang ditaruh dalam pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, dan orang yang selama perkara sedang bergantung atas perintah hakim, orang tersebut telah dimasukkan dalam tahanan.

---

<sup>63</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta: PT. Pradnya Paramita 2006), h.483 Pasal 1909 KUHPer tentang Pembuktian Daluarsa

Dalam literature Islam, masalah tentang kesaksian perempuan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian sistematis tentang *qadla* (peradilan), salah satu cakupan dari fiqh (sebagai kumpulan tafsir ayat al-Qur'an di bidang hukum), di samping tafsir al-Qur'an. Dapat dikatakan bahwa masalah tersebut telah setua literature Islam karena literature fiqh tertua yang masih dapat kita simak sampai saat ini, seperti *al-Muwatta* dan *al-Umm*, maupun tafsir telah memuat masalah tersebut. Meskipun demikian, masalah tersebut tetap merupakan salah satu topik yang menjadi fokus perhatian para feminis muslim.

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, kesaksian perempuan dalam hukum Islam adalah 1:2 dengan bobot kesaksian dari laki-laki, hal ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan jika tidak ada dua laki-laki sebagai saksi, maka boleh digantikan satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan.

Baik hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sama-sama membolehkan perempuan menjadi saksi di persidangan selama ia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada bobot keabsahan kesaksiannya, dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan di atas yaitu 1:2 dengan laki-laki, namun yang satu hanya sebagai pengingat yang lain. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak membedakan bobot keabsahan saksi perempuan dan laki-laki.

### **C. Implikasi Terhadap Proses Peradilan**



Kedudukan saksi perempuan dalam suatu tindak pidana memang diperlukan, tetapi saksi perempuan hanya memiliki setengah nilai dari kesaksian laki-laki. Hal ini sangat diskriminatif terhadap perempuan karena, di pandang kurang memiliki kompetensi atau di pandang kurangnya pengetahuan yang dimiliki perempuan sehingga nilai kesaksiannya pun kurang.

Hal ini disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik dan budaya yang berlaku adalah menempatkan perempuan hanya berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu seiring dengan perubahan sosial di masyarakat, nilai kesaksian seorang perempuan seharusnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki.

Dengan berbedanya kedudukan saksi sebagai rukun dan saksi sebagai alat bukti menyebabkan berbeda pula fungsi antara keduanya. Saksi sebagai rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perubahan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa implikasi dari perbedaan kedua sistem hukum tersebut adalah proses peradilan yang sulit untuk dilaksanakan karena ketentuan saksi yang mengharuskan berjumlah 4 orang apabila saksi tersebut perempuan karena, kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki. Jika jumlah saksi kurang dari 4 orang untuk kesaksian seorang perempuan maka kesaksiannya tidak dapat diterima dan proses peradilan tidak dapat dilakukan.

Hal ini terjadi karena ilmu pengetahuan perempuan pada saat itu masih sangat lemah sehingga membuat kedudukan perempuan tidak diakui sepenuhnya. Menurut pandangan penulis, saat ini perempuan sudah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki pengalaman dan keterampilan yang sama dengan laki-laki sehingga peraturan tentang nilai kesaksian dan kedudukan saksi perempuan dan laki-laki harus diperbaharui sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta cara pandang terhadap kaum perempuan saat ini. Sehingga tidak ada perbedaan pandangan perempuan dan laki-laki yang menentukan jumlah saksi dalam suatu tindak pidana untuk melakukan proses peradilan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan ketentuan saksi dalam hukum Islam dan hukum positif, dalam hukum Islam apabila terdapat saksi perempuan maka harus 2 orang perempuan agar dapat dikatakan 1 saksi, karena nilai kesaksian perempuan setengah dari nilai kesaksian laki-laki. Sedangkan dalam hukum positif seorang saksi perempuan sudah cukup untuk dikatakan sebagai saksi dan kesaksiannya dapat di persaksikan dalam pengadilan.
2. Terjadinya perbedaan ketentuan saksi dalam kedua sistem hukum ini adalah dalam hukum Islam perempuan dianggap kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam masalah publik dan budaya masyarakat. Sehingga kesaksian perempuan pada saat itu diragukan dalam persidangan. Sedangkan dalam hukum positif perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki karena dalam hukum positif semua sama dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Sehingga hukum positif tidak membedakan ketentuan saksi baik perempuan maupun laki-laki nilai kesaksiannya sama.
- 3.

#### B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dapat di sarankan Bahwa undang-undang semakin kompleks adalah kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan perubahan manusia yang diatur juga semakin kompleks sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan yang mereka lalui. Oleh sebab itu Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana ataupun Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana sudah seharusnya direvisi mengikuti perkembangan hukum yang berlaku (hukum positif) yang mana dalam kedudukan saksi korban atau korban tindak pidana harus secara tegas diatur, dan mengenai tindak pidana zina juga sudah harus di revisi agar lebih tegas dalam memberikan hukuman kepada para pelaku tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mujieb. M dan Tholhah Mabruri dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta:PT. Pustaka Fitdaus,1994).
- Al-Asqalani, Ibnu, Hajar, *Bulughul Maram*, (Surakarta:Insan Kamil,Solo:2014).
- Amnawaty, Watirahmiria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2008).
- Amir, Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor : Prenada Madia 2003).
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*
- Diibul, Bigha, Mustofa, *At-Tahdziib*, Terj. Sunarto, Adlchayah dan Multazam.M (Surabaya:CV Bintang Pelajar, 1984).
- Daud, Ali, Mohammad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1983).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Hanitijo, Ronny, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Galhia Indonesia, 1990).
- Kadir, Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung : PT. Citra Asitya Bhakti, 2004).
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

- Kanter, EY dan Sianturi, SY, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Storia Grafika, 2002).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Titik Terang, 1995).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- Najib, Mohammad dan Ihsanudin dan Hidayati, Sri (eds), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002).
- P. Jimmy dan Zulkifli, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Sumur, 1977).
- Qayyim, Ibnu, Al-Jauziyah, *Al-Thuruq AL-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung : PT Al-Ma' Arif 1993).
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborators)*, satgas PMH, Cetakan kedua, 2011.
- Siswanto, Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Soesilo. R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, (Bogor: Politeia, 1982).
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988).
- Subekti. R dan Tjitrosudibio. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001).

Sukardja, Ahmad dan Ishak Arifin dan Khaeruddin. A dll, *Bidang Studi Syari'ah*, (Jakarta: 1983).

Suprayoga, Imam dan Tabroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Wardi, Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-S1-2006-maskin2101-867-BAB2\\_210-2.pdf](http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-S1-2006-maskin2101-867-BAB2_210-2.pdf). Di akses 22 Juli 2016

[http://googleweblight.com/?lite\\_url=https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/24/hukum-pembuktian/](http://googleweblight.com/?lite_url=https://litaniaager.wordpress.com/2011/07/24/hukum-pembuktian/). Di akses 20 September 2017

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dzimmi>. Di akses 04 April 2017

<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/03/perlindungan-saksi-dalam-peradilan.html?m=1>. Di akses 29 September 2016

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>. Di akses 29 September 2016